

EVOLUSI IDEOLOGI POLITIK ISLAM MASYUMI

***Wawancara Dr. Phil. Ahmad-Norma Permata dengan
Dr. REMY MADINIER***

Peneliti Institut Kajian Asia Tenggara Kontemporer IRASEC
(Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine)
dosen EHESS (École des hautes études en sciences sociales/ French for "School
for Advanced Studies in the Social Sciences)

***ANP: Mengapa Anda tertarik
mengkaji politik Islam?***

RM: Pada awalnya saya tidak secara langsung tertarik studi Islam. Minat saya waktu itu adalah bidang sejarah, khususnya Timur Jauh. Saya ingin menjadi sejarawan, tapi bukan tentang sejarah Barat. Lalu saya konsultasi dengan professor saya waktu itu, negara mana kira-kira yang menarik untuk studi saya. Lalu dia menyarankan Indonesia. Waktu itu, tahun 1980-an, Indonesia belum banyak dikenal di Perancis. Padahal Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

***ANP: Apa yang menarik dari Islam
di Indonesia?***

DR: Yang menarik adalah keterbukaannya. Sehingga tumbuh sebuah horizon yang lengkap. Semua ada di sini: mulai dari Islam yang sederhana seperti "Islam Samin", lalu ada gerakan mainstream seperti NU dan Muhammadiyah, dan juga ada Islam radikal seperti Jamaah Islamiyah.

***ANP: Bagaimana dinamika studi
Islam di Perancis?***

Studi Islam di Perancis cukup kuat berkembang khususnya aliran klasik, atau yang kita kenal dengan Orientalisme. Ini memiliki akar sejak zaman tokoh-tokoh seperti Louis Massignon, penulis buku tentang Al-Hallaj. Lalu ada nama Maurice Lombard, ayah dari sejarawan Denis Lombard yang juga promotor dari disertasi saya, merupakan tokoh terkenal kajian Islam Abad Tengah, khususnya di kawasan Mediterania.

***ANP: Bagaimana dengan kajian
Islam politik?***

Kajian Islam politik di Perancis merupakan perkembangan baru, yang berkembang pesat kira-kira sejak dua puluh tahun terakhir. Ada banyak sarjana Perancis yang cukup dikenal secara internasional. Misalnya, ada Olivier Roy yang menulis tentang kegagalan agenda politik Islam radikal, lalu ada Gilles Kepel yang bukunya *Le Revanche de Dieu* (Pembalasan Tuhan) banyak dijadikan rujukan dalam menjelaskan bangkitnya agama-agama dalam politik kontemporer –setelah banyak ilmuwan sosial menganggap agama adalah kisah masa lalu. Lalu ada

juga Sabrina Mervin yang mengkaji tentang politik Islam Syiah.

ANP: Anda menulis disertasi tentang Masyumi, bisa diceritakan temuan Anda?

Pada awalnya saya hendak menulis ttg sejarah sosial Masyumi, tentang siapa saja orang-orang yang menjadi anggota masyumi, siapa saja yang memilih mereka dll. Tapi karena kekurangan bahan-bahan tentang itu, maka tidak maksimal. Hingga yang lebih lengkap adalah analisis tentang ideologi Masyumi.

Fakta menarik yang saya temukan adalah adanya evolusi ideologi yang dialami masyumi. Secara sederhana barangkali evolusi ini bisa disebut sebagai “desakralisasi” politik Islam. Misalnya, ketika didirikan tahun 1945 Masyumi mengusung sebuah agenda untuk memperjuangkan negara Islam, dimana Islam menjadi dasar negara. Namun dalam perkembangannya, visi politik ini mengalami perubahan. Masyumi tidak lagi bercita-cita mendirikan negara Islam, melainkan “negara yang berdasarkan Islam,” yaitu memperjuangkan sistem Islam dalam konteks kenegaraan Indonesia. Lalu visi ini berubah lagi, ketika Masyumi menyatakan hendak mendorong terbentuknya negara Indonesia yang “berdasarkan nilai-nilai Islam.” Perkembangan terakhir terjadi tahun 1955, ketika Masyumi menyusun platform politik menjelang Pemilu, dimana ada 55 program politik dan – kalau kita baca– tidak satu pun ditemukan kata “Islam” atau “Muslim.” Artinya Masyumi kemudian mengusung cita-cita politik yang didasarkan

pada nilai-nilai universal, seperti demokrasi, keadilan, kesejahteraan dsb.

ANP: Mengapa evolusi itu terjadi?

RM: Paling tidak ada empat alasan yang saya temukan. *Pertama*, kemunculan gerakan *Darul Islam* pimpinan Kartosuwiryo yang secara terang-terangan melawan pemerintah dan ingin mendirikan sebuah negara Islam Indonesia. Kemunculan ini menjadikan Masyumi berada pada posisi sulit. Kalau Masyumi masih secara eksplisit menyatakan hendak membangun negara Islam, atau negara yang berdasarkan Islam, maka itu akan membuatnya seolah dekat dengan agenda politik DI. Padahal Masyumi adalah partai pendukung tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dan memang, lawan-lawan politik Masyumi mencoba mengeksploitasi isu ini, dengan mengatakan bahwa Masyumi memiliki agenda anti-RI, sebagaimana *Darul Islam*. Karena itu para pimpinan Masyumi memutuskan untuk mencari jargon politik yang berbeda dari DI.

Kedua, permusuhan dengan PKI. Sebelum tahun 1948, Masyumi relatif dekat dan banyak bergaul dengan para politisi Marxis seperti Tan Malaka. Namun setelah pemberontakan Madiun 1948 PK menjadi musuh bersama partai-partai politik. Dan Masyumi juga merasa perlu membangun kedekatan dengan partai-partai yang melawan PKI ini –terutama partai-partai Kristen. Saya kira ini menarik, bahwa tahun 1950-an partai-partai Kristen sangat dekat dengan Masyumi, mereka selalu memihak kepada Masyumi dalam setiap isu

politik di Parlemen. Hanya setelah tahun 1960-an hubungan partai Kristen dan partai Islam menjauh.

Ketiga, sebagai partai Islam cukup yakin untuk mendapatkan dukungan dari kalangan Islam yang taat, yang menginginkan dimasukkannya Islam ke dalam sistem politik. Namun para pimpinan Masyumi menganggap bahwa itu tidak cukup, karena jumlah Muslim yang taat tidaklah terlalu banyak. Karena itu mereka memutuskan untuk memperluas basis dukungan kepada kelompok Muslim lain yang tidak menginginkan Islam dijadikan dasar negara.

Keempat, waktu itu Masyumi dipimpin oleh orang-orang terpelajar, seperti M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Yusuf Wibisono, yang memang memiliki kapasitas memahami dan menganalisis situasi politik secara rasional. Sehingga, mereka ini pun mengembangkan program-program politik yang rasional-pragmatis. Dan terbukti Masyumi sukses dan pertarungan politik.

ANP: Tapi mengapa Masyumi tetap tidak cukup berhasil dalam Pemilu 1955?

RM: Waktu itu Masyumi memang partai terbesar, dan sangat yakin memenangkan Pemilu. Dan semua orang juga percaya hal ini. sehingga PNI, saingan utama Masyumi, mencoba mengulur-ulur Pemilu karena takut kalah. Sayangnya memang pada waktu itu belum ada survey-survey politik seperti sekarang ini. Sehingga para pemimpin Masyumi –dan juga politisi secara umum– hanya bekerja berdasarkan analisis dan kira-kira. Dan

musibah politik itu terjadi pada Masyumi ketika pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi. Para pimpinan Masyumi tidak terlalu menghiraukan keluarnya NU, karena mereka umumnya melihat NU dipimpin oleh para Kyai yang tidak punya ilmu politik dan manajemen modern. Mereka dianggap sebagai golongan kolot yang tidak akan banyak mempengaruhi dukungan terhadap Masyumi. Menjelang Pemilu para tokoh Masyumi memperkirakan mereka akan memenangkan antara 30% sampai 40% suara Pemilu. Dan ketika Pemilu dilaksanakan tahun 1955 hasilnya sangat mengejutkan. Masyumi hanya menempati posisi kedua dengan 20%, di bawah PNI yang meraih 22%, sementara NU berhasil mendapatkan 18%, dan bahkan PKI juga tidak jauh di belakang dengan 14%. Jadi Masyumi memang mengalami kegagalan besar dalam Pemilu.

ANP: Apa akibat dari kegagalan tersebut?

RM: Hasil itu benar-benar membuat shock para pimpinan partai ini. Begitu mengejutkannya, sampai-sampai harian *Abadi*, yang berafiliasi dengan Masyumi, tidak berani memuat hasil Pemilu 1955 ini. Tidak ada hasil pemilu di harian *Abadi*, karena mungkin hasil itu terlalu menyedihkan dan memalukan. Dan kekalahan ini memicu perpecahan internal dalam Masyumi. Kelompok puritan dalam partai mengatakan bahwa Masyumi kalah karena tidak lagi konsisten dengan tujuan memperjuangkan negara Islam. Sementara ada kelompok moderat yang tetap menginginkan

Masyumi memperjuangkan demokrasi secara rasional-pragmatis. Pertentangan ini membuat partai limbung. Puncaknya, setelah Sukarno membubarkan Parlemen dan menerapkan Demokrasi Terpimpin tahun 1957, sejumlah para pimpinan Masyumi –M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dll– bergabung dengan PRRI (Pergerakan Republik Revolusioner Indonesia) di Sumatra Barat, dan mengajukan ultimatum kepada Sukarno untuk kembali kepada demokrasi parlementer. Dan di dalam hutan para pimpinan Masyumi ini terlibat dalam penyusunan sebuah Pembukaan Undang-Undang (*Pre-ambule*) tentang sebuah Indonesia Serikat yang didasarkan kepada gagasan demokrasi model Barat –bukan model Islam. Akibat dari ini Sukarno membubarkan Masyumi.

ANP: Apa yang terjadi pada Masyumi pasca dibubarkan?

RM: Ketika rezim Orde Lama tumbang dan diganti dengan rezim Orde Baru yang sangat anti Sukarno, sebenarnya ada harapan besar di kalangan pendukung Masyumi untuk menjadi bintang dan pahlawan politik. Karena Masyumi –bersama PSI– adalah partai yang sangat menentang Demokrasi Terpimpin Sukarno, dan sangat mendukung demokrasi. Namun sejarah berkata lain. Orde Baru yang didominasi oleh militer sepertinya khawatir bahwa jika Masyumi diberikan kesempatan untuk kembali ke panggung politik pasti akan mendominasi, dan pengaruh militer akan kalah. Dan saya kira ketakutan itu memang betul. Masyumi masih memiliki basis

dukungan kuat, dan dua partai besar pesaingnya –PNI dan PKI– bisa dikatakan sudah runtuh bersama jatuhnya Sukarno. Dan kita saksikan Orde Baru menjadikan Masyumi sebagai pesakitan politik.

ANP: Apa reaksi tokoh-tokoh Masyumi terhadap kebijakan politik Orde Baru?

Para pimpinan Masyumi menggeser strategi. Ketika perjuangan politik struktural dari atas gagal, mereka mencoba membangun dari bawah melalui aktivitas dakwah Islam. Maka dibentuklah Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Dan ada perkembangan sangat menarik di sini. DDI banyak mendapatkan dukungan dana –bahkan mungkin satu-satunya– dari pemerintah Arab Saudi, dan karenanya terjadi perubahan karakter keagamaan menjadi makin konservatif. Padahal sebelumnya Arab Saudi sama sekali bukan model yang dicontoh Masyumi. Di jaman kejayaannya di kalangan pendukung Masyumi Arab Saudi sering dipandang sinis, sebagai sistem sosial-keagamaan yang kolot, yang mengidentikkan Islam dengan onta, dan bukan kemajuan.

ANP: Menurut Anda, mengapa partai-partai Islam sekarang ini tidak bisa sebesar Masyumi?

RM: Saya kira Masyumi memiliki posisi unik yang tidak dimiliki partai-partai Islam sekarang ini. Yaitu –meskipun masih ada Perti– Masyumi bisa dikatakan adalah satu-satunya partai Islam kala itu. Orang dengan sangat mudah mengidentikkan politik Islam dengan Masyumi. Sehingga

pilihan waktu itu cukup jelas, sebaliknya, sekarang ini begitu banyak partai Islam, yang justru membuat orang bingung. Kedua barangkali adalah faktor ketokohan. Masyumi memiliki tokoh-tokoh yang bukan hanya terampil berpolitik namun juga memiliki visi politik yang hebat. Yang bahkan partai-partai Kristen pun kala itu menjadi pendukung setia program-program politik Masyumi. Sekarang ini saya tidak melihat ada tokoh politik Islam yang memiliki visi besar seperti Natsir, atau Sjafruddin.

ANP: Indonesia dianggap cukup berhasil membangun demokrasi, menurut Anda seberapa besar kontribusi politik Islam?

Sangat besar. Islam merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia. Kemampuan para politisi Muslim untuk membangun peluang dalam sistem demokrasi membuat proses ini berjalan lancar. Sebab jika ekspresi politik Islam tidak muncul ke permukaan, baik karena disumbat oleh sistem maupun karena ketidakmampuan para pemimpin Islam sendiri, bisa dipastikan Islam akan menjadi kendaraan besar radikalisme politik dari orang-orang yang tidak suka dengan demokrasi. Kita sudah melihat ini di akhir periode Masyumi, juga sepanjang era Orde Baru. Bahkan hal ini juga terjadi di masa-masa awal era Reformasi, ketika Indonesia belum memiliki alat negara yang efektif banyak kaangan yang mencoba menggunakan Islam sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan pemaksaan kehendak.

ANP: Tapi masih saja ada kalangan Muslim tidak setuju Demokrasi?

Saya kira ini memang dilema partai agama. Bukan hanya partai Islam, tapi juga di kalangan partai Kristen di Barat dan juga partai-partai agama yang lain. Selalu ada pertentangan mengenai jalinan antara agama dan politik. Di satu pihak, akan selalu ada orang yang meyakini bahwa kebenaran agama adalah mutlak karena berasal dari Tuhan. Dan mereka berharap kekuasaan Tuhan akan turun dalam kehidupan manusia jika kehidupan politik diatur dalam cara-cara seperti yang diajarkan agama. Tapi *kan* ini juga dilematis, karena kita tidak bisa memastikan apakah politik agama itu merupakan kehendak Tuhan atau kehendak para politisi. Sementara juga ada kelompok yang beranggapan bahwa kekuasaan Tuhan itu tidak terjangkau oleh manusia, tapi ada jalan yang mendekati, yaitu demokrasi.

ANP: Bagaimana prospek demokrasi di Indonesia?

RM: Saya cukup optimis dengan demokrasi di Indonesia. Ada dua alasan dasar: *pertama*, Indonesia memiliki banyak generasi baru intelektual, sarjana dan sastrawan yang berpendidikan tinggi, dan mampu memahami dunia di sekelilingnya dengan objektif dan rasional. Dengan pemahaman yang objektif dan rasional terhadap persoalan-persoalan politik, maka demokrasi tetap akan menjadi pilihan terbaik. Kedua, Indonesia memiliki pers yang terbuka. Ini mengagumkan. Kalau berbicara tentang teknologi,

pendidikan atau kesehatan Indonesia tentu masih tertinggal jauh dari negara-negara Barat. Tapi tidak dalam bidang pers. Media massa seperti Tempo atau Kompas bisa disejajarkan dengan media-media utama di Barat, yaitu dalam menyampaikan berita maupun melakukan pendidikan publik dengan informasi-informasi yang kritis. Dalam hal ini Indonesia lebih maju dibanding negara-negara lain yang sedang menjalankan proses demokrasi.

Tapi ada satu masalah yang

perlu diperhatikan. Yaitu persoalan sosial. Persoalan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Saya melihat ada jarak ekonomi yang lebar sekali di Indonesia. Dan ini bisa menjadi persoalan politik yang serius. Jika persoalan kesenjangan ekonomi tidak segera diatasi, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang dari kelas ekonomi bawah akan merasa bahwa sistem politik yang sekarang sedang dijalani bukanlah pilihan yang baik buat mereka. Dan ini bisa jadi poin sensitif.